PONTIANAK POST

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2019 Hal.: 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Polda Tetapkan Dua Tersangka

## Kasus Bantuan Khusus Desa

**PONTIANAK**-Kabid Humas, Kombes Pol Donny Charles Go memastikan Polda Kalbar menetapkan dua orang tersangka lain dalam kasus dana bantuan khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Mereka adalah BB dan RI yang diketahui keduanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki peranan kuat dalam kasus ini.

Donny juga membeberkan hasil penghitungan kerugian negara yang diakibatkan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp19 miliar. "Dari hasil pemeriksaan oleh Ditkrimsus Polda Kalbar, mereka (PB dan IAT) merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini," jelasnya saat diwawancarai, Selasa (26/11) kemarin.

Donny mengatakan penetapan tersangka terhadap keduanya dijatuhi setelah hasil pemeriksaan keluar pada (8/11) lalu oleh Ditkrimsus Polda Kalbar. Sementara untuk kedua tersangka tersebut, kata dia, akan dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat di minggu ini.

Disisi lain, dirinya menuturkan selain kedua tersangka ini, dan pemeriksaan masih terus akan dilakukan karena melirik masih adanya peluang untuk menetapkan tersangka-tersangka lainnya.

"Untuk kasus ini memang terkesan agak lama ditangani. Karena kita harus menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kurang lebih 18 bulan lamanya," sambungnya.

Terkait keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, menurut dia, hingga saat ini masih belum jelas dan sangat sepihak. Hal itu masih perlu didalami lagi, dan sampai saat ini masih dipersilakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang berwenang untuk memperjelas dan memperkuat bukti lain terkait kasus ini.

"Namun pada prinsipnya Ditkrimsus polda kalbar dalam hal ini tetap melanjutkan penanganan terhadap kasus bantuan khusus dana sosial ini," tegasnya.

Sementara untuk saksi yang telah diperiksa sampai saat ini, sambungnya ada 176 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan. "Sementara untuk Bupati dengan inisial SG sebelumya sudah dipanggil, hanya saja beliau baru bisa memenuhi panggilan tersebut di pemanggilan berikutnya dan untuk kelanjutannya masih akan dipastikan lagi nantinya," pungkasnya. ***(sig)***